

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Kampung Telaga Daing melalui Pelestarian Nilai Budaya Lokal di Terengganu Darul Iman, Malaysia

Khairul Rahman¹, Dita Fisdian Adni², Rijalul Fikri³, Siti Hajar Binti Abdul Rauf⁴, Putri Angini Silalahi⁵, Marvin Samudera⁶

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

⁴ Fakultas Sains Sosial Gunaan, Universiti Sultan Zainal Abidin

^{5,6} Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

* khairul.ip@soc.uir.ac.id

Abstrak

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan dibutuhkan tata Kelola pemerintahan kampung yang berbasis pada nilai-nilai budaya lokal. Nilai budaya lokal pada prinsipnya mengandung ajaran-ajaran moral yang bisa mendorong tercapainya tujuan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Dinamika pemerintahan telah membawa perubahan sosial yang cepat, dimana sering kali menyebabkan menurunnya nilai-nilai pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menyebabkan hilangnya pengetahuan tentang kepercayaan, nilai sosial, nilai moral, dan praktik budaya yang selama ini menjadi bagian dari identitas masyarakat. Akibatnya, pelayanan yang diberikan kurang menyentuh Masyarakat, terjadinya penyimpangan, pengambilan keputusan yang semakin jauh dari akar budaya lokal, dan menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan. Diperlukan langkah-langkah nyata yang berbasis pada nilai budaya lokal. Berdasarkan identifikasi ada beberapa nilai budaya lokal yang perlu dilestarikan dalam tata Kelola pemerintahan yakni musyawarah, jujur, bekerja sama, disiplin, bekerja keras, patuh pada pemimpin, dan penghormatan terhadap tradisi menjadi landasan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan kampung. Metode pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan keberlanjutan program. Pengabdian Masyarakat telah terlaksana dengan baik berkat dukungan dari berbagai pihak, dengan ditandai adanya peningkatan pengetahuan, penerapan nilai budaya, harmonisasi, partisipasi Lembaga adat dan masyarakat, serta adanya pemahaman Bersama bahwa diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis nilai budaya lokal.

Kata kunci: Penguatan, Tata Kelola Pemerintahan, Nilai Budaya Lokal

Abstract

Realizing development goals requires village governance based on local cultural values. Local cultural values in principle contain moral teachings that can support the achievement of development goals through good governance. The dynamics of governance have brought rapid social change, which often leads to a decline in government values in governance. This has led to a loss of knowledge about the beliefs, social values, moral values and cultural practices that have been part of the community's identity. As a result, services provided do not touch the community, irregularities occur, decision-making is increasingly far from local cultural roots, and community participation in government activities decreases. Real steps based on local cultural values are needed. Based on the identification, there are several local cultural values that need to be preserved in governance, namely deliberation, honesty, cooperation, discipline, hard work, obedience to leaders, and respect for tradition as a basis for strengthening village governance. The method of implementing community service is preparation, implementation, evaluation, and program sustainability. Community Service has been carried out well thanks to the support of various parties, marked by an increase in knowledge, implementation of cultural values, harmonization, participation, and collaboration.

Keywords: Strengthening, Governance, Local Cultural Values



PENDAHULUAN

Penguatan tata Kelola pemerintahan berbasis nilai budaya lokal merupakan salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk membangkitkan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Masyarakat untuk digunakan sebagai faktor pendukung Pembangunan agar mencapai hasil yang optimal. Kampung Telaga Daing, merupakan sebuah kampung/desa yang terletak di Negara Bagian Terengganu Darul Iman, Malaysia, merupakan salah satu komunitas yang kaya akan nilai budaya lokal dan kearifan tradisional. Warisan budaya yang kaya merupakan potensi penting untuk keberlanjutan Pembangunan. Identitas lokal memiliki peran dalam membentuk kesatuan masyarakat dan memperkuat solidaritas.

Dinamika pemerintahan telah membawa perubahan sosial yang cepat, hal ini diperkuat dengan pengaruh modernisasi dan globalisasi, pelestarian nilai-nilai budaya lokal menghadapi tantangan besar, dimana sering kali menyebabkan menurunnya nilai-nilai pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fakta dilapangan menunjukkan, modernisasi dan globalisasi telah membawa perubahan sosial yang cepat, yang sering kali menyebabkan pengikisan nilai-nilai budaya lokal terutama dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan, nilai sosial, nilai moral, dan praktik budaya yang selama ini menjadi bagian dari identitas masyarakat. Akibatnya, pelayanan yang diberikan kurang menyentuh Masyarakat, terjadinya penyimpangan, pengambilan keputusan yang semakin jauh dari akar budaya lokal, dan menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat menghambat proses pembangunan kampung yang inklusif dan berkelanjutan.

Tata kelola pemerintahan kampung yang baik tidak hanya mencakup aspek-aspek manajerial dan administratif, tetapi juga bagaimana pemerintahan tersebut dapat mencerminkan dan mempertahankan nilai-nilai budaya yang menjadi dasar kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini diperlukan strategi nyata yang berbasis pada nilai budaya lokal. Nilai-nilai budaya lokal dapat berperan sebagai panduan moral dan etika dalam pengambilan keputusan, serta sebagai sumber inspirasi dalam mengembangkan kebijakan dan program pembangunan yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan kampung dengan mengintegrasikan pelestarian nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan.

Nilai-nilai budaya lokal dapat diintegrasikan ke dalam model tata kelola untuk meningkatkan efektivitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip tata kelola dapat bersifat dinamis dan responsif terhadap kondisi lokal (Poppelwell & Overton, 2022). Nilai-nilai budaya lokal memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan dan tata kelola lokal (Reese & Rosenfeld, 2012, 2013, 2016). Tata Kelola pemerintahan berbasis budaya lokal memadukan unsur-unsur budaya ke dalam strategi pembangunan dan tata kelola lokal untuk meningkatkan keberhasilan Pembangunan. Nilai budaya lokal tidak hanya berfungsi sebagai identitas masyarakat, tetapi juga menjadi dasar penting dalam tata kelola pemerintahan.

Strategi pembangunan budaya dapat mempengaruhi tata kelola tingkat lokal, sehingga menimbulkan tantangan dan peluang baru (Oakes, 2006). Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan fungsi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan tidak lepas dari kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah (K. R. Rahman et al., 2023). Warisan budaya dan identitas lokal merupakan aspek penting yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah (Canaan, 2019). Tata Kelola pemerintahan dengan berbasisi atau menggabungkan nilai-nilai budaya lokal ke dalam praktik tata Kelola pemerintah dapat meningkatkan kapasitas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan lokal dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

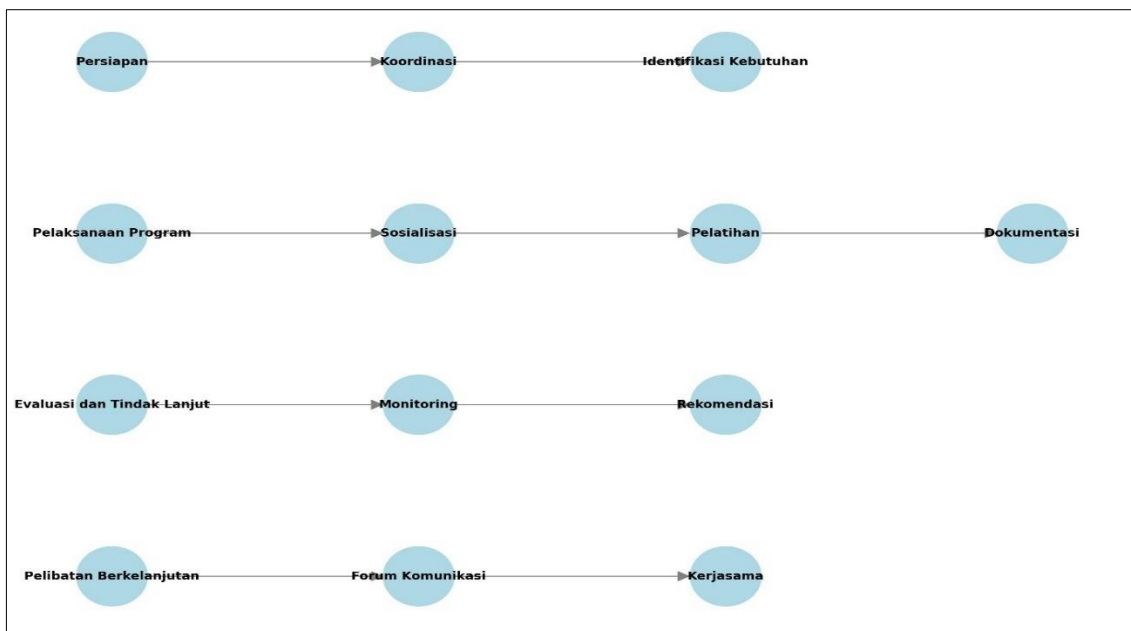
Unsur budaya dan alam memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah perkampungan, menyoroti pentingnya mengidentifikasi dan mengevaluasi keterkaitan nilai-nilai budaya dan pemangku kepentingan lokal dalam mengelola nilai-nilai budaya (Šmid Hribar & Ledinek Lozej, 2013). Pemerintah lokal dapat mengembangkan kebijakan budaya yang khas

yang mencerminkan dan memanfaatkan nilai-nilai budaya setempat. Pemerintahan lokal telah membuat rencana budaya yang memanfaatkan kedekatan mereka dengan konstituen dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, yang menyoroti pentingnya konteks budaya lokal dalam pembuatan kebijakan (Johanson et al., 2014).

Tata kelola yang berbasis nilai-nilai budaya lokal memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat hubungan sosial, dan menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Setiap kampung atau daerah pada dasarnya memiliki nilai-nilai budaya sebagai pedoman, petunjuk, dan nasehat untuk dilaksanakan dalam mengoptimalkan Pembangunan kampung. Di Kampung Telaga Daing, integrasi nilai-nilai seperti bekerja keras, bekerja sama, musyawarah, hidup jujur, patuh pada pemimpin, dan penghormatan terhadap tradisi menjadi landasan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan kampung. Dengan mengintegrasikan budaya lokal dalam tata kelola, diharapkan Kampung Telaga Daing dapat menjadi contoh bagaimana tradisi dan modernisasi dapat berjalan beriringan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan berdaya saing.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat dengan judul Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Kampung Telaga Daing melalui Pelestarian Nilai Budaya Lokal di Negara Bagian Terengganu Darul Iman, Malaysia memuat persiapan, pelaksanaan program, evaluasi dan tindak lanjut, keberlanjutan program yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Kampung Telaga Daing melalui Pelestarian Nilai Budaya Lokal di Negara Bagian Terengganu Darul Iman, Malaysia

Penjelasan dan analisis dari bagan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persiapan

Pada tahap persiapan dilakukan Koordinasi dengan Pemerintahan Kampung (Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung) dan Tokoh Masyarakat yakni melakukan diskusi awal dengan pemerintah kampung, tokoh adat, dan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi nilai-nilai budaya lokal yang relevan serta masalah dalam tata kelola pemerintahan. Kemudian melakukan Pemetaan Kebutuhan (*Needs Assessment*) Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terkait pelestarian budaya lokal dan penguatan

tata kelola, melalui wawancara, survei, atau diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*).

2. Pelaksanaan Program

- Sosialisasi dan Penyuluhan

Sosialisasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan di kampung Telaga Daing memahami dan mendukung upaya penguatan tata kelola pemerintahan kampung melalui pelestarian nilai budaya lokal. Sosialisasi kepada Masyarakat dan distribusi materi informasi mencakup jadwal kegiatan, manfaat yang diharapkan, dan cara masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian yang dilakukan. Pada tahap ini juga melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya nilai budaya lokal dalam tata kelola pemerintahan dengan menggunakan pendekatan berbasis partisipasi untuk membangun kesadaran masyarakat.

- Pelatihan dan Pendampingan

Memberikan pelatihan kepada perangkat kampung tentang cara mengintegrasikan nilai budaya lokal ke dalam praktik pemerintahan, seperti bekerja sama berbasis adat dan pengelolaan konflik secara tradisional. Metode pelatihan yang dibuat untuk memastikan peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang diperlukan untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam tata kelola pemerintahan lokal. Bentuk pelatihan yang dilakukan berupa penyampaian teori, diskusi kelompok, Latihan praktek dan membuat simulasi nilai-nilai apa yang bisa diwujudkan dalam tata Kelola pemerintahan. Pendampingan tidak hanya memastikan keberhasilan program, tetapi juga memberdayakan kampung untuk melanjutkan dan mengembangkan inisiatif tersebut secara mandiri di masa mendatang. Bentuk kegiatan berupa identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana pendampingan, dan pelaksanaan tim.

- Dokumentasi dan Digitalisasi Budaya

Mengarahkan dan membantu pemerintah kampung (komunitas) dalam mendokumentasikan tradisi lokal (cerita rakyat, seni, dan adat) melalui media cetak dan digital sebagai Langkah konkrit perwujudan nilai budaya dan pelestarian nilai budaya lokal. Metode penerapan teknologi dibuat untuk memberikan solusi konkret yang dapat langsung diterapkan dalam tata kelola pemerintahan lokal yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai nilai budaya lokal. Penggunaan teknologi berpotensi mendukung penggabungan nilai-nilai budaya lokal ke dalam pengembangan kapasitas pemerintah melalui perangkat untuk pelestarian budaya, keterlibatan masyarakat, keterbukaan dan proses pengambilan keputusan. Dengan teknologi, pemerintah kampung dapat mengelola pemerintahan lebih efektif, transparan, dan mendukung partisipasi aktif Masyarakat. Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa analisis kebutuhan teknologi seperti sistem informasi kampung, platform digital untuk pelestarian budaya, dan alat komunikasi modern. Selain itu, kegiatan juga dilakukan dengan konsultasikan dengan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung (JPKK) dan tokoh masyarakat untuk memahami kebutuhan masyarakat lokal.

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Melakukan evaluasi berkala terhadap program yang telah dijalankan dan menyusun laporan evaluasi untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. Evaluasi ini dirancang untuk memberikan dukungan yang berkelanjutan bagi kampung dalam mengimplementasikan program penguatan tata kelola pemerintahan melalui pelestarian nilai budaya lokal. Tindak lanjutnya bisa berupa merekomendasikan kebijakan atau praktik tata kelola yang berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan membentuk tim lokal yang bertanggung jawab melanjutkan program pelestarian budaya.

4. Keberlanjutan Program

Keberlanjutan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan dimana Tim pengabdian membuka diri untuk terus melakukan komunikasi dengan Pemerintahan Kampung Telaga Daing untuk melihat sejauh mana capaian kegiatan pengabdian yang dilakukan dan melakukan upaya-upaya positif lainnya. Keberlanjutan program untuk memastikan bahwa program penguatan tata kelola pemerintahan lokal melalui pelestarian nilai budaya lokal tidak hanya berjalan dalam jangka pendek, tetapi juga terus memberikan manfaat dan berkembang dalam jangka panjang. Oleh karena itu diperlukan adanya forum komunikasi berbasis budaya dan adanya kerjasama multi-pihak menggandeng akademisi, lembaga adat, dan sektor swasta untuk mendukung kegiatan pelestarian budaya secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Kampung Telaga Daing melalui Pelestarian Nilai Budaya Lokal di Negara Bagian Terengganu Darul Iman, Malaysia telah terselenggara dengan baik. Berbagai pihak telah mendukung terlaksananya program diantaranya pemerintah kampung Telaga Daing, Masyarakat kampung dan pihak Universiti Sultan Zainal Abidin. Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara Universitas Islam Riau (UIR) dengan Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) sebagai tindak lanjut dari Kerjasama internasional. Kegiatan pengabdian internasional ini terdiri dari beberapa tim yang memiliki judul dan fokus yang berbeda dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan program dilaksanakan pada hari Selas-Rabu, tanggal 07-08 Oktober 2024 bertempat di Lambo Sari, Jalan Ketapang, Kampung Telaga Daing Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia.



Gambar 2. Foto Bersama Tim Pengabdian Masyarakat Internasional dan Masyarakat Kampung Telaga Daing, Negara Bagian Terengganu Darul Iman, Malaysia

Kegiatan pengabdian diawali dengan acara pembukaan yang dilaksanakan di Aula Lambo Sari. Kegiatan pengabdian dilanjutkan dengan kegiatan pelaksanaan program dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dan dokumentasi. Untuk ketercapaian kegiatan pengabdian, tim pengabdian memanfaatkan waktu seefektif mungkin dimana setelah memberikan materi tim pengabdian memberikan ruang untuk diskusi dan tanya jawab terkait dengan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Kampung Telaga Daing melalui Pelestarian Nilai Budaya Lokal. Dalam diskusi tergambaran berbagai permasalahan yang terjadi dan pemberian solusi terhadap masalah yang dihadapi. Acara sosialisasi dan pelatihan secara seremoni ditutup dengan saling

memberi cenderamata sebagai bentuk kenang-kenangan dan keberlanjutan komitmen baik dari UniSZA, Pejabat Pemerintah Kampung Telaga Daing dan Universitas Islam Riau.



Gambar 3. Pelaksanaan Program Sosialisasi dan Pelatihan, serta dilanjutkan dengan pemberian cenderamata sebagai bentuk komitmen keberlanjutan pogram pengabdian kepada Masyarakat



Gambar 4. Salah satu bentuk tindak lanjut kegiatan pengabdian masyarakat yakni pelastarian nilai budaya lokal dengan metode sosialisasi dan pelatihan yang memiliki dampak ekonomi

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan ini telah memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial dan ekonomi mitra, yang dapat dilihat melalui peningkatan produktivitas dan efektifitas kegiatan pemerintahan Kampung Telaga Daing. Kampung Telaga Daing terdapat “Lambo Sari” sebagai platform bagi mengendalikan aktivitas alami dan interaktif seni, menyediakan ruang eksplorasi pengalaman kebudayaan Terengganu dan akan menjaga reputasi seni dan budaya. Dari aspek ekonomi penguatan tata Kelola pemerintahan berbasisi budaya lokal diharapkan mampu meningkatkan taraf kehidupan Masyarakat. Secara langsung kegiatan ini telah memberikan dampak positif dalam aspek sosial, terutama dalam peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan nilai budaya lokal dan memperbaiki tata kelola pemerintahan di tingkat kampung. Berikut adalah data yang menunjukkan dampak sosial kegiatan:

Tabel 1. Dampak Sosial Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Indikator Sosial	Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan
Pengetahuan tentang Tata Kelola Pemerintahan	Kurangnya Pemahaman nilai budaya lokal	Pemerintah Kampung menyadari adanya nilai budaya lokal dan bagian dari jati diri kampung dalam optimalisasi pembangunan
Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Budaya	Kurangnya partisipasi dan kolaborasi	Peningkatan Kesadaran dan Keterlibatan pihak-pihak terutama lembaga adat
Keberagaman Acara Budaya Kampung	Masih terbatas (Baik dari segi kualitas dan kuantitas)	Terjadi Peningkatan Acara budaya lokal yang merupakan kerja sama pemerintah kampung dan komunitas budaya

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan budaya dan pengetahuan mereka mengenai tata kelola pemerintahan kampung. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan berhasil meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga warisan budaya serta memperbaiki cara pengelolaan pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif.

Melibatkan masyarakat lokal dalam proses tata kelola sangatlah penting. Nilai-nilai budaya inti seperti komunitas, tatanan hierarki, dan harmoni secara signifikan memengaruhi kegiatan tata kelola, yang menunjukkan bahwa memahami dan menggabungkan nilai-nilai ini dapat meningkatkan respons pemerintah terhadap kebutuhan warga negara (Minh & Nguyễn Anh, 2024). Hubungan kerja antara pemerintah kampung/desa dengan lembaga adat merupakan faktor pendorong kemajuan pembangunan. Hal ini mempertegas pentingnya tata Kelola pemerintahan yang mengadopsi nilai budaya lokal (K. Rahman et al., 2020). Membangun kemitraan dengan organisasi budaya dan pemangku kepentingan setempat dapat meningkatkan kapasitas tata kelola. Tata kelola berbasis masyarakat di Desa dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya lokal sebagai modal sosial, mendorong kerja sama dan kolaborasi pemangku kepentingan untuk pulih dari kondisi yang tidak diinginkan (Al Fikri & Nugroho, 2023)

Memanfaatkan sistem pengetahuan adat, dapat berkontribusi pada nilai-nilai demokrasi dan tata kelola yang berkelanjutan. Sistem ini menawarkan mekanisme untuk penyelesaian konflik dan kohesi sosial, yang dapat diintegrasikan ke dalam struktur tata kelola formal untuk meningkatkan efektivitasnya (Tolla & Singh, 2021). Mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam pengembangan keterampilan kepemimpinan dapat secara signifikan meningkatkan keunggulan kepemimpinan, menekankan pentingnya kecerdasan budaya dalam kepemimpinan (Sahertian, 2024). Lebih lanjut capaian-capaian (luaran) dari kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian yang dihasilkan dari Solusi yang diberikan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Permasalahan (Kondisi Terkini)	Solusi Yang Diberikan	Luaran Setelah Kegiatan
1	Erosi Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan	Melakukan edukasi terkait dengan nilai-nilai budaya lokal yang penting dalam menunjang tata kelola pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pengetahuan Penerapan Praktis: Nilai-nilai budaya lokal diterapkan dalam praktek tata kelola pemerintahan. Diukur dengan penilaian kasus-kasus implementasi nilai budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal
		Memastikan nilai-nilai budaya yang berkembang sesuai	<ul style="list-style-type: none"> Harmonisasi Nilai Budaya: Penyesuaian dan harmonisasi antara nilai-nilai

No	Permasalahan (Kondisi Terkini)	Solusi Yang Diberikan	Luaran Setelah Kegiatan
		dengan nilai budaya lokal yang mendukung keberlanjutan pemerintahan lokal	<p>budaya lokal dengan praktik pemerintahan lokal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Terhadap Keberlanjutan: Kebijakan dan praktek pemerintahan lokal mendukung keberlanjutan dan pelestarian nilai budaya lokal. Diukur melalui penguatan tata kelola pemerintahan.
2	Kurangnya Integrasi Nilai Budaya dalam Tata Kelola Pemerintahan	<p>Memberikan contoh dari berbagai sumber terkait praktek integrasi nilai budaya dalam tata kelola pemerintahan</p> <p>Simulasi Pengambilan Keputusan Berbasis Budaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pengetahuan tentang Integrasi Budaya: Ahli Jawatankuasa kampung memahami dan dapat menjelaskan dan mempraktekkan integrasi nilai budaya dalam tata kelola pemerintahan kampung. • Kemampuan Pengambilan Keputusan Berbasis Budaya: pemerintah kampung mampu menerapkan metode pengambilan keputusan berbasis budaya, seperti musyawarah mufakat, dalam situasi simulasi dan nyata. Diukur dengan: Penilaian keterampilan melalui simulasi pengambilan keputusan dan observasi penerapan metode dalam situasi pemerintahan lokal.
3	Kurangnya Kolaborasi Antar Lembaga.	<p>Mengundang berbagai pihak yang berkepentingan untuk membahas penguatan tata kelola pemerintahan kampung berbasis budaya lokal</p> <p>Pemerintah kampung melibatkan lembaga adat, lembaga pendidikan, dan masyarakat lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>Menanamkan kembali nilai-nilai kebersamaan dan harmoni dalam pembangunan kampung yang berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Diskusi dan Perencanaan Kolaboratif: Terbentuknya forum atau kelompok kerja yang melibatkan berbagai pihak untuk membahas dan merencanakan penguatan tata kelola berbasis budaya. Diukur dengan: Jumlah pertemuan yang diadakan, jumlah peserta dari berbagai lembaga, dan dokumentasi hasil diskusi. • Peningkatan Partisipasi Lembaga: Lembaga adat, lembaga pendidikan, dan masyarakat lokal secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan kampung. Diukur dengan: Jumlah lembaga yang terlibat, frekuensi keterlibatan, dan umpan balik mengenai tingkat kolaborasi. • Revitalisasi Nilai Kebersamaan dan Harmoni: Penerapan nilai-nilai kebersamaan dan harmoni dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal, dengan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Diukur dengan: Penilaian perubahan dalam sikap masyarakat terhadap

No	Permasalahan (Kondisi Terkini)	Solusi Yang Diberikan	Luaran Setelah Kegiatan
			kebersamaan dan harmoni, serta evaluasi keberhasilan kegiatan pembangunan yang melibatkan nilai-nilai tersebut.
4	Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan lokal.	<p>Memberikan materi tentang arti penting partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal</p> <p>Membentuk kelompok kerja budaya kampung dan bekerja sama dengan pemerintah lokal untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan budaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kesadaran dan Keterlibatan: Masyarakat memahami pentingnya partisipasi mereka dalam pemerintahan lokal dan menunjukkan peningkatan keterlibatan. Diukur dengan: tingkat kehadiran dan partisipasi dalam pertemuan kampung. • Pembentukan dan Aktivitas Kelompok Kerja: Terbentuknya kelompok kerja budaya kampung yang aktif dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan budaya. Diukur dengan: hasil implementasi kebijakan budaya dalam tata kelola pemerintahan kampung.
5	Kurangnya Pemahaman dan Kapasitas Aparatur Kampung.	<p>Pelatihan Peningkatan Kapasitas tentang Budaya Lokal</p> <p>Menyediakan Program Mentoring dan Pendampingan</p> <p>Pembentukan Unit Pelestarian Budaya di Pemerintahan lokal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan: Aparatur kampung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pelestarian budaya dan cara mengintegrasikan nilai budaya dalam kebijakan dan program lokal. Diukur dengan: penerapan materi dalam tugas sehari-hari. • Peningkatan Kapasitas dan Dukungan: Aparatur kampung mendapatkan bimbingan dan dukungan berkelanjutan dari mentor untuk menerapkan pengetahuan tentang budaya lokal dalam menjalankan tugas. Diukur dengan: Implementasi perubahan yang disarankan dalam kebijakan atau program kampung. • Pengelolaan dan Pelestarian Budaya: Unit Pelestarian Budaya terbentuk dan aktif dalam mengelola dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal dalam pemerintahan lokal. Diukur dengan: Pembentukan unit, dan laporan mengenai kontribusi unit terhadap pelestarian budaya lokal dan kebijakan lokal
6	Belum terdokumentasinya nilai budaya lokal sebagai bagian	Program Penyusunan Peraturan Kampung tentang moto pemerintahan Kampung sebagai	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya peraturan kampung yang Mendukung Budaya Lokal: Peraturan kampung yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dan berfungsi sebagai pendorong pembangunan kampung. Diukur dengan: Penyusunan

No	Permasalahan (Kondisi Terkini)	Solusi Yang Diberikan	Luaran Setelah Kegiatan
	yang harus diterapkan.	pendorong pembangunan	dan pengesahan Perdes, serta implementasi dan penilaian dampaknya terhadap pembangunan kampung dan pelestarian budaya lokal.
		Sosialisasi nilai-nilai budaya dalam tata kelola pemerintahan lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kesadaran dan Pengertian: pemerintah kampung dan Masyarakat memahami nilai-nilai budaya lokal yang relevan dan bagaimana menerapkannya dalam tata kelola pemerintahan lokal. Diukur dengan: umpan balik mengenai pemahaman dan penerapan nilai budaya dalam kegiatan pemerintahan lokal.
		Dokumentasi dan Digitalisasi Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu komunitas dalam mendokumentasikan tradisi lokal (cerita rakyat, seni, dan adat) melalui media cetak dan digital sebagai langkah pelestarian. • Melaksanakan electronic government berbasis budaya (keterbukaan, partisipatif, responsif dll) • Penggunaan teknologi berpotensi mendukung penggabungan nilai-nilai budaya lokal ke dalam pengembangan kapasitas pemerintah melalui perangkat untuk pelestarian budaya, keterlibatan masyarakat, dan proses pengambilan keputusan.

Strategi budaya dalam tata Kelola pemerintahan adalah strategi yang diarahkan untuk membangkitkan nilai-nilai budaya (tradisional) yang terkandung dalam Masyarakat untuk digunakan sebagai faktor pendukung Pembangunan agar bisa mencapai hasil yang optimal (Adisasmita, 2011). Penguatan tata Kelola pemerintahan kampung berbasis pada nilai budaya lokal dapat dilakukan dengan strategi yakni mengadopsi model tata kelola, adanya keterlibatan komunitas (Lembaga adat), kebijakan budaya, tata Kelola kolaboratif, dan pengembangan system pengetahuan lokal.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan didapati budaya lokal secara signifikan memengaruhi praktik tata Kelola pemerintahan dan mampu mendukung optimalisasi pencapaian tujuan Pembangunan. Budaya lokal memberikan prinsip dalam tata Kelola meliputi kerja keras, hidup jujur, saling percaya, semangat kerja sama, patuh pada pemimpin, dan penghormatan terhadap tradisi menjadi landasan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan kampung. Tata kelola berbasis budaya lokal melibatkan pengintegrasian unsur-unsur budaya ke dalam kerangka tata kelola yang lebih luas untuk meningkatkan pembangunan lokal. Pendekatan ini memerlukan pemahaman yang bagus, koordinasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kemampuan beradaptasi terhadap konteks dan tantangan lokal.

SIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Telaga Daing, Terengganu Darul Iman, Malaysia, telah berhasil mencapai tujuan utama yaitu penguatan tata kelola pemerintahan kampung melalui pelestarian nilai budaya lokal. Pelaksanaan kegiatan Kegiatan ini memberikan dampak positif baik secara ekonomi maupun sosial kepada mitra dan

masyarakat setempat. Secara sosial, partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya meningkat signifikan, dan kesadaran akan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik juga semakin tinggi. Pemanfaatan nilai-nilai budaya lokal untuk memperkuat kapasitas pemerintah melibatkan pemahaman pengaruh budaya terhadap tata kelola lokal, mengatasi tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya, mengakui peran kecerdasan budaya, dan berpotensi memanfaatkan teknologi untuk mendukung integrasinya. Hasil pengabdian kepada masyarakat memberikan wawasan berharga tentang pengaruh budaya terhadap tata kelola dan tantangan yang terkait dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam tata Kelola pemerintahan kampung

Beberapa capaian yang telah diperoleh dari pelaksanaan kegiatan ini adalah peningkatan perekonomian, pelestarian budaya lokal, peningkatan pengetahuan tata Kelola pemerintahan lokal, dan peningkatan partisipasi Masyarakat. Secara keseluruhan, kegiatan ini telah berhasil memberikan dampak positif baik dalam aspek ekonomi dan sosial. Dampak positif sangat dirasakan dalam hal peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kampung Telaga Daing. Kegiatan ini juga menjadi model bagi pengembangan desa lainnya yang memiliki potensi budaya dan kearifan lokal. Terkait dengan penguatan tata Kelola pemerintahan berbasis budaya lokal ada beberapa saran yang diperlukan untuk menjamin keberlanjutannya yakni penguatan forum komunikasi budaya secara berkala, diversifikasi program pelatihan, pengembangan sistem monitoring, pendampingan dan melaksanakan proses pembelajaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terlaksananya kegiatan pengabdian Masyarakat di Kampung Telaga Daing Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih kepada Universitas Islam Riau yang telah memberikan pendanaan dan menyetujui kegiatan pengabdian Masyarakat melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) UIR. Terimakasih juga disampaikan kepada Fakultas Sains Sosial Gunaan, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) yang telah mendukung selama kegiatan dilaksanakan. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada pejabat Pemerintah Kampung Telaga Daing dan Masyarakat yang telah bersedia menerima dan menyambut dengan baik kegiatan pengabdian Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Graha Ilmu.
- Al Fikri, F. F., & Nugroho, R. A. (2023). Sustainable Tourism Management in Post Pandemic: Lesson-Learned from Pongkok Village Tourism Community Governance. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences*, 21(1), 360–370. <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2023-21.1.0028>
- Canaan, R. P. (2019). Creative economy and cultural heritage: A proposal to tourism development and appreciation of local identity. *Strategic Design Research Journal*, 12(2), 276–288. <https://doi.org/10.4013/SDRJ.2019.122.12>
- Johanson, K., Kershaw, A., & Glow, H. (2014). The Advantage of Proximity: The Distinctive Role of Local Government in Cultural Policy. *Australian Journal of Public Administration*, 73(2), 218–234. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12078>
- Minh, N. T. H., & Nguyễn Anh, C. (2024). Specific cultural values affect basic political activities in Vietnam. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2404622>
- Oakes, T. (2006). Cultural strategies of development: Implications for village governance in China. *Pacific Review*, 19(1), 13–37. <https://doi.org/10.1080/09512740500417616>

- Poppelwell, E., & Overton, J. (2022). Culture, scale and the adaptation of good governance: Insights from SOEs in Samoa and Tonga. *World Development Perspectives*, 28. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2022.100468>
- Rahman, K., Prayuda, R., Amri, P., & Mulyanto, B. (2020). Village Government's Work Relationship with Indigenous Institutions in Indonesia. *Talent Development & Excellence*, 12(1), 2549–2562. <http://www.iratde.com>
- Rahman, K. R., Khotami, K., Ibrahim, A. Z., & Buana, D. S. (2023). Pengembangan Kapasitas Pemerintah Mukim Singkir Yan Kedah Malaysia Dalam Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan. *BERDAYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(02 (Oktober)), 9–16. <https://doi.org/10.25299/berdaya.2023.14768>
- Reese, L. A., & Rosenfeld, R. A. (2012). Comparative civic culture: The role of local culture in urban policy-making. In *Comparative Civic Culture: The Role of Local Culture in Urban Policy-Making*. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84901144336&partnerID=40&md5=435db7ac998dac2cf708f0b8737dc55c>
- Reese, L. A., & Rosenfeld, R. A. (2013). Comparative civic culture: The role of local culture in urban policy-making. In *Comparative Civic Culture: The Role of Local Culture in Urban Policy-Making*. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84937136840&partnerID=40&md5=3c6a3f5422ce4d232794bfce58fa98fa>
- Reese, L. A., & Rosenfeld, R. A. (2016). Comparative Civic Culture: The Role of Local Culture in Urban Policy-Making. In *Comparative Civic Culture: the Role of Local Culture in Urban Policy-Making*. <https://doi.org/10.4324/9781315573045>
- Sahertian, P. (2024). Integration of Local Cultural Values into Leadership Skill Development to Enhance Leadership Excellence in Indonesian Organizations. *Quality - Access to Success*, 25(200), 212–221. <https://doi.org/10.47750/QAS/25.200.22>
- Šmid Hribar, M., & Ledinek Lozej, Š. (2013). The role of identifying and managing cultural values in rural development. *Acta Geographica Slovenica*, 53(SPL.2), 371–378. <https://doi.org/10.3986/AGS53402>
- Tolla, A. D., & Singh, S. B. (2021). GOOD GOVERNANCE IN ETHIOPIA: A THOUGHT ON LEGISLATING FOR THE GADDA INDIGENOUS JUSTICE SYSTEM. *Internet Journal of Restorative Justice*, 9, 2–21. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85124349028&partnerID=40&md5=2d960604e725d2efac7505b314c82547>